

**BPS**

Perwakilan Biro Pusat Statistik  
KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA TIMUR  
Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Rungkut, Surabaya  
Telepon: 8411735, 8438526, 8438611, 8438873, 8439343



LABEL SEMENTARA SENSUS BARANG 2014			
Ruang	ID	Lokasi	Petugas
B2102	123-1098-0988-1	6813	A5

LAPORAN PENDAHULUAN

# SENSUS EKONOMI 1996

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



*BPS*

KANTOR STATISTIK PROPINSI  
JAWA TIMUR



LAPORAN PENDAHULUAN

# SENSUS EKONOMI 1996



*BPS*

KANTOR STATISTIK PROPINSI  
JAWA TIMUR

## Kata Pengantar

Laporan Pendahuluan Sensus Ekonomi 1996 ini ditujukan terutama kepada Bp. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur. Akan tetapi juga tidak tertutup bagi pihak lain yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996.

Dalam laporan ini dikemukakan bahwa Sensus Ekonomi 1996 adalah merupakan serangkaian panjang kegiatan Statistik yang dilaksanakan dengan acuan metodologi Statistika. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Dan sesuai dengan metodologinya maka hasil dari Sensus Ekonomi 1996 belum dapat diharapkan segera diperoleh.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang Sensus Ekonomi 1996, dalam laporan ini dikemukakan mengenai metodologi dan tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. Dan untuk menjangkau kalangan yang luas maka dalam laporan ini dihindari adanya pembahasan dan penggunaan istilah yang terlampau teknis.

Masukan dan saran perbaikan sangat dihargai untuk mendapatkan hasil Sensus Ekonomi 1996 sebaik-baiknya. Semoga laporan ini memberikan manfaat secukupnya.

Kantor Statistik Propinsi  
Jawa Timur  
Kepala,



Soewondo Hardjopawiro, Msc.  
NIP. 340000718

## 1. PENDAHULUAN.

Sensus Ekonomi 1996 adalah merupakan sensus ekonomi yang kedua kalinya, setelah pelaksanaan sensus ekonomi 1986. Dan sebagai kegiatan sensus, sensus ekonomi diprogramkan untuk dilaksanakan secara periodik 10 (sepuluh) tahun sekali. Sehingga sensus ekonomi yang ketiga akan diselenggarakan nanti pada tahun 2006.

### 1.1. PERIODISASI.

Penyelenggaraan kegiatan sensus secara periodik dimaksudkan untuk dapat mengetahui perkembangan suatu keadaan dari waktu ke waktu sehingga sejalan dengan itu maka seluruh kegiatan sensus dilaksanakan secara periodik:

- **Sensus Penduduk**, setiap sepuluh tahun sekali yaitu pada tahun-tahun yang berakhiran angka 0 (nol): 1970, 1980, 1990, 2000 dan seterusnya.
- **Sensus Pertanian**, setiap sepuluh tahun sekali yaitu pada tahun-tahun yang berakhiran angka 3 (tiga): 1983, 1993, 2003 dan seterusnya.
- **Sensus Ekonomi**, setiap sepuluh tahun sekali yaitu pada tahun-tahun yang berakhiran angka 6 (enam): 1986, 1996, 2006 dan seterusnya.

Periodisasi penyelenggaraan sensus yang 10 tahun sekali dipilih dengan perhitungan antara lain karena kegiatan sensus merupakan kegiatan yang besar. Dalam arti, kegiatan sensus selalu mencakup wilayah yang luas, meliputi satuan pengamatan yang besar, sehingga harus melibatkan tenaga dalam jumlah besar serta harus ditunjang dengan dana yang tidak sedikit. Oleh keadaan itulah maka sampai saat ini kegiatan sensus belum bisa dilaksanakan dalam periode kurang dari 10 tahun sekali.

Dalam hal-hal tertentu, periodisasi 10 tahun, bahkan ideal untuk beberapa hal lain misalnya:

- Sebelum 10 tahun diperkirakan belum terjadi perubahan besar/mendasar dalam hal; pola/tradisi, aturan/regulasi ataupun

arah/orientasi dari suatu kegiatan masa (kependudukan, pertanian atau kegiatan usaha lainnya).

- Jangka waktu 10 tahun ideal untuk membuat ukuran perkembangan (evaluasi) dari suatu keadaan. Sebab, seandainya terjadi penurunan keadaan yang tidak dikehendaki, dalam 10 tahun diperkirakan belum berakibat fatal dan program perbaikan dapat segera disiapkan.
- Jangka waktu 10 tahun ideal untuk menguji berhasil/tidaknya suatu program yang mendasar.
- Jangka waktu 10 tahun cukup ideal bagi pemerintah untuk merencanakan suatu program yang mendasar.

## 1.2. TUJUAN SENSUS EKONOMI 1996

Kembali kepada Sensus Ekonomi 1996. Sebagai ulangan dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 1986 (dengan sensus ekonomi 1986), maka salah satu tujuan sensus ekonomi 1996 adalah untuk dibandingkan hasilnya dengan hasil sensus ekonomi 1986. Dalam membandingkan hal tersebut akan dicari tahu bagaimana perkembangan dunia usaha dalam 10 tahun terakhir. Perbandingan dilakukan baik terhadap banyaknya kegiatan usaha maupun masing-masing karakteristiknya.

Selain untuk mengetahui perkembangan dunia usaha dalam 10 tahun terakhir, pelaksanaan sensus ekonomi 1996 juga mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- Mendapatkan data ekonomi yang dapat mencerminkan keadaan ekonomi sektoral, regional dan nasional.
- Mendapatkan struktur kegiatan ekonomi/usaha baik menurut lapangan usaha dan wilayah maupun skala usaha (besar, menengah, kecil dan usaha rumah tangga).
- Menghasilkan Direktori Kegiatan Ekonomi, khususnya untuk yang berskala besar dan menengah berbadan hukum.
- Menghasilkan Kerangka Contoh Induk untuk survei-survei di sektor ekonomi.
- Menyediakan data ekonomi mikro berupa profil, ciri dan karakteristik di setiap sektor.

### 1.3. KEGIATAN EKONOMI / USAHA.

Sensus ekonomi pada dasarnya adalah suatu kegiatan penelitian mengenai keadaan ekonomi pada suatu periode. Adapun keadaan ekonomi yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat melakukan kegiatan ekonomi atau dengan kata lain, bagaimana keadaan dunia usaha. Oleh karena itu dalam sensus ekonomi fokus penelitiannya adalah kegiatan ekonomi/usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Termasuk sebagai kegiatan Ekonomi/Usaha antara lain adalah Pembuatan Kapal yang dilakukan oleh PT. PAL, Perbankan oleh Bank-Bank Pemerintah dan swasta, Perdagangan seperti dilakukan oleh Toko Siola, Angkutan seperti yang dilakukan oleh PJKA, Garuda dan PO.Akas dan lain sebagainya. Juga termasuk sebagai kegiatan ekonomi/usaha adalah Warung nasi pecel "Nyamleng", bakso keliling, tukang becak, jamu gendong dan lain sebagainya.

Dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi/usaha yang dilakukan oleh masyarakat, sekurang-kurangnya dapat dipisahkan dalam dua dimensi yaitu dimensi sektoral dan dimensi skala usaha.

Dalam dimensi sektoral, secara nasional kita sudah bersepakat akan adanya 10 sektor kegiatan usaha yaitu sektor:

1. Pertanian.
2. Pertambangan dan Penggalian.
3. Industri Pengolahan.
4. Listrik, gas dan air minum.
5. Konstruksi.
6. Perdagangan, Restoran dan Jasa Akomodasi.
7. Angkutan dan Perhubungan.
8. Perbankan dan jasa perusahaan.
9. Jasa-jasa.
0. Lainnya.

Dalam masing-masing sektor yang disepakati tersebut terkandung bermacam-macam kegiatan usaha yang kurang lebih sejenis.

Dalam dimensi skala usaha sekurang-kurangnya dibedakan atas:

- a. Usaha kecil/usaha rumahtangga.

- b. Usaha menengah.
- c. Usaha besar.

Dalam penelitian yang dilakukan sensus ekonomi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat juga dicermati menurut kedua dimensi tersebut. Satu hal yang perlu disampaikan secara khusus, bahwa dalam sensus ekonomi, kegiatan ekonomi sektor pertanian tidak dicakup. Hal tersebut dikarenakan kegiatan ekonomi masyarakat disektor pertanian sudah diteliti secara khusus dalam sensus pertanian.

#### **1.4. CAKUPAN.**

Dalam pengertian tertentu sensus dapat diartikan sebagai penelitian menyeluruh, dibandingkan dengan survei yang diartikan sebagai penelitian atas satuan terbatas.

Dalam sensus semua unit penelitian yang berada di wilayah penelitian akan di"data" atau dicatat keterangannya. Sedang dalam survei, beberapa dari unit penelitian saja yang didata sedang kesimpulannya berlaku untuk seluruh wilayah penelitian.

Sejalan dengan itu, bahwa Sensus Ekonomi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, maka wilayah penelitian Sensus Ekonomi adalah seluas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selengkapnya, cakupan Sensus Ekonomi 1996 adalah seluruh kegiatan ekonomi/usaha yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kegiatan ekonomi asing. Sedang kegiatan ekonomi yang dicakup adalah seluruh sektor usaha ekonomi, kecuali sektor pertanian.

#### **1.5. DIREKTORI TERPADU PERUSAHAAN.**

Salah satu tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 seperti disebutkan di muka adalah untuk memperoleh Direktori kegiatan ekonomi, khususnya untuk yang berskala besar dan menengah berbadan hukum. Direktori tersebut kemudian dinamakan sebagai Direktori terpadu perusahaan.

Direktori terpadu perusahaan pada dasarnya adalah daftar yang berisi Nama dan Alamat perusahaan disertai dengan beberapa keterangan lain yang umum sifatnya tetapi penting, misalnya produk yang dihasilkan, banyaknya tenaga kerja, kapasitas produksi dan lain sebagainya. Disebut terpadu karena

dalam direktori tersebut terangkum kegiatan usaha dari bermacam-macam sektor.

Direktori semacam itu diperkirakan akan dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha. Pemerintah akan memanfaatkan direktori tersebut sebagai alat memantau kegiatan usaha. Sementara pelaku usaha akan memanfaatkan direktori tersebut sebagai peta acuan dalam melaksanakan usahanya.

Dengan direktori tersebut pemerintah dapat mengetahui dengan cepat sektor usaha apa yang menjadi kekuatan suatu wilayah, potensi wilayah mana yang belum dimanfaatkan oleh dunia usaha, faktor apa yang sekiranya dibutuhkan suatu wilayah untuk meningkatkan gairah usaha. Sedang pelaku usaha dapat mengenali dengan baik di wilayah mana dia bisa memperoleh produk yang dibutuhkan dalam usahanya. Dengan direktori terpadu perusahaan pula, pelaku usaha dapat memantau di wilayah mana sudah jenuh dan wilayah mana yang masih membuka peluang untuk menanamkan modalnya.

Beberapa kegunaan lain diperkirakan masih terbuka yang kesemuanya mengarah pada pertumbuhan positif perekonomian nasional.

#### 1.6. KERANGKA CONTOH INDUK.

Dalam butir yang lain di muka juga disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan sensus ekonomi 1996 antara lain untuk mendapatkan kerangka contoh induk bagi survei-survei di sektor ekonomi.

Kerangka contoh induk adalah sesuatu yang sangat penting bagi terlaksananya survei, khususnya bila survei tersebut dilaksanakan secara periodik.

Selama ini beberapa survei di bidang ekonomi juga sudah secara periodik dilaksanakan. Berbeda dengan sensus, periodisasi survei tersebut adalah lebih pendek waktu pengulangannya seperti misalnya:

- Survei Industri                      - Triwulanan  
                                                  - Tahunan
  - Survei Konstruksi                 - Tahunan
  - Survei Pertambangan             - Tahunan
  - Survei Hotel                         - Bulanan  
                                                  - Tahunan
  - Survei Bioskop                     - Triwulanan
- dan lain sebagainya.

Survei-survei tersebut dilaksanakan secara khusus karena adanya kepentingan khusus untuk melihat perkembangannya dalam periodisasi yang lebih pendek. Dan karena pengulangannya yang tahunan, maka kegiatan survei tersebut dikategorikan sebagai survei rutin. Pada saatnya, hasil dari survei rutin di bidang ekonomi ini akan dibandingkan dengan hasil sensus ekonomi. Sesuai dengan sifatnya maka dalam pelaksanaan survei tidak semua unit penelitian didata, melainkan hanya sebagian saja. Dalam menetapkan sebgai unit yang didata tersebut, secara statistik dibutuhkan suatu kerangka contoh (*sampling frame*). Dengan kerangka contoh dan metode statistik penarikan contoh (*sample*) diputuskan untuk mendata beberapa unit observasi untuk disurvei dan kesimpulan hasil surveinya nanti akan berlaku bagi seluruh unit di wilayah tersebut (*general*).

Selama ini kerangka contoh dibuat setiap kali suatu survei hendak dilaksanakan sehingga, keterbandingannya antara pelaksanaan di satu periode dengan pelaksanaan di periode berikutnya tidak cukup relevan. Sehingga tingkat kesalahannya bisa tinggi. Memperbaiki kekurangan tersebut maka kerangka contoh induk sangatlah dibutuhkan. Sehingga nanti semua survei periodik di bidang ekonomi dapat dibanding-bandingkan dengan lebih akurat karena menggunakan acuan yang sama.

## 1.7. LANDASAN HUKUM

Sebagai suatu kegiatan besar Sensus ekonomi 1996 dapat disebutkan sebagai "Hajat pemerintah RI" seperti halnya Pemilihan Umum. Dan dalam melaksanakan hajatan sensus ekonomi 1996, pemerintah telah menunjuk salah satu instansinya yaitu Biro Pusat Statistik (BPS) dengan seluruh jajarannya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Penunjukan tersebut dituangkan dalam instruksi Presiden No.4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996.

Bersama-sama dengan aturan hukum pelaksanaan sensus dan survei yang lain, beberapa landasan hukum yang menopang BPS dalam menyelenggarakan sensus ekonomi 1996 adalah:

1. UU No. 6 Tahun 1960 Tentang Sensus.
2. UU No. 7 Tahun 1960 Tentang Statistik.
3. PP No. 2 Tahun 1992 Tentang Organisasi BPS.
4. PP No.29 Tahun 1985 Tentang Sensus Ekonomi.
5. Keppres No. 6 Tahun 1992 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja BPS.

6. Inpres No. 4 Tahun 1994 Tentang Sensus ekonomi 1996.
7. Peraturan, Keputusan dan Instruksi lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan sensus ekonomi 1996.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## 2. METODOLOGI.

Disebutkan di muka bahwa hasil sensus ekonomi 1996 akan digunakan untuk melihat perkembangan dunia usaha. Perkembangan yang dimaksud antara lain adalah dalam hal banyaknya (populasi) dan karakteristik kegiatan ekonominya.

Oleh maksud tersebut maka dapat diketahui bahwa sensus ekonomi 1996 pada dasarnya adalah terdiri dari dua kelompok kegiatan yaitu kelompok kegiatan untuk mendapatkan populasi kegiatan ekonomi/usaha dan, kelompok kegiatan untuk mendapatkan karakteristik ekonomi/usaha. Dalam kedua kelompok kegiatan tersebut selalu terbawa kebutuhan untuk melihat kegiatan ekonomi dalam dimensi sektoral dan dimensi skala usaha.

### 2.1. PENGHITUNGAN POPULASI KEGIATAN EKONOMI/USAHA.

Untuk dapat melakukan penghitungan (tepatnya; perkiraan) populasi kegiatan ekonomi, dibutuhkan beberapa jenis kegiatan sebagai berikut:

#### 2.1.1. *Updating* wilayah pencacahan.

Wilayah pencacahan (wilcah) adalah satuan wilayah - bukan wilayah administratif - di bawah desa/kelurahan yang berisi sekitar 200 rumahtangga dan dibatasi oleh batas alam/batas yang jelas. Wilcah ini adalah wilayah bentukan BPS yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pencacahan baik untuk sensus atau survei. Oleh BPS Wilcah sudah dibentuk semenjak pelaksanaan Sensus Penduduk 1970 dan terus digunakan dalam pelaksanaan sensus/survei sampai sekarang dan beberapa waktu lagi di masa datang. Akan tetapi oleh perkembangan keadaan, beberapa wilcah yang terbentuk sebelumnya dapat mengalami beberapa perubahan karakteristik. Misalnya bertambah/berkurangnya rumahtangga akibat mutasi penduduk, adanya perubahan wilayah administrasi desa/kelurahan atau kecamatan yang berpengaruh pada batas wilcah dan lain sebagainya.

Atas kenyataan itulah maka dalam setiap pelaksanaan sensus selalu diawali dengan kegiatan *updating* wilayah pencacahan, agar segala perubahan yang terjadi di setiap wilcah dapat diakomodir.

Pada pelaksanaan sensus ekonomi 1996, kegiatan *updating* wilayah pencacahan bahkan lebih khusus, karena dalam kegiatan

tersebut juga dilakukan identifikasi wilcah menurut kepadatan kegiatan ekonomi/usaha di dalamnya. Dalam identifikasi tersebut wilcah kemudian dipisahkan dalam kategori wilcah konsentrasi dan non konsentrasi. Wilcah konsentrasi adalah yang dipadati kegiatan ekonomi, misalnya pasar atau pertokoan dan lain sebagainya, sedang wilcah non konsentrasi adalah wilcah hunian biasa.

Tindak lanjut dari identifikasi tersebut adalah bahwa terhadap wilcah yang dikategorikan sebagai konsentrasi, kemudian dipecah lagi dibentuk beberapa wilayah kerja (wilker), dengan pertimbangan agar dalam pelaksanaan sensus ekonomi, wilayah kerja tersebut dapat ditangani oleh satu orang petugas pencacah.

Ke dalam wilcah dan wilker itulah petugas diterjunkan untuk melakukan pencacahan terhadap kegiatan ekonomi/usaha yang ditemui dengan cara mendatangi semua bangunan yang dijumpai.

#### 2.1.2. Penyusunan Direktori Terpadu Perusahaan.

Disebutkan di muka bahwa direktori terpadu perusahaan adalah daftar perusahaan berskala besar/ sedang yang berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum semacam ini dipandang sebagai perusahaan yang relatif mapan keberadaannya. Maksudnya, perusahaan ini tidak akan mudah tutup, ganti usaha atau pindah lokasi. Oleh karenanya dalam sensus ekonomi 1996 perusahaan semacam ini diperlakukan secara khusus yaitu dengan dibuatkan direktorinya. Maksud selanjutnya adalah agar pemantauan terhadap perusahaan skala ini dapat dilakukan lebih cermat.

Penyusunan direktori terpadu perusahaan ini diawali dengan melakukan penyalinan daftar/direktori yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau badan yang diperkirakan memilikinya. Seperti misalnya Departemen Perindustrian untuk daftar perusahaan sektor industri, Kadin untuk daftar perusahaan anggotanya dan lain sebagainya.

Daftar salinan tersebut kemudian digabungkan menjadi direktori terpadu perusahaan awal, yang oleh tahapan kegiatan berikutnya akan disempurnakan.

#### 2.1.3. Pendaftaran Kegiatan Ekonomi/Usaha.

Dalam kegiatan inilah banyaknya (populasi) kegiatan ekonomi mulai dihitung (tepatnya; dibuat perkiraannya). Sebab dalam kegiatan pendaftaran (*listing*) ini, petugas mendatangi seluruh bangunan yang

dijumpai di wilayah tugasnya (wilcah/wilker) untuk melakukan pendaftaran terhadap seluruh kegiatan ekonomi yang dijumpainya. Dalam pendaftaran tersebut dicatat antara lain nama dan alamat kegiatan ekonomi/usaha, badan hukum, banyaknya tenaga kerja, produknya dan lain sebagainya.

Hasil dari kegiatan pendaftaran ini, sebagian yaitu yang berbadan hukum digunakan untuk menyempurnakan direktori terpadu perusahaan. Adapun secara keseluruhan hasil pendaftaran ini digunakan untuk memperkirakan populasi kegiatan ekonomi/usaha menurut sektor dan skala usaha. Perkiraan populasi kegiatan ekonomi/usaha dilakukan dengan menggunakan formulasi statistik yang sejalan dengan penetapan metodologi pencacahan yang ditempuh. Di segi lain, hasil pencacahan ini digunakan pula untuk mulai menyusun kerangka contoh induk kegiatan ekonomi/usaha.

## **2.2. MENDAPATKAN KARAKTERISTIK KEGIATAN EKONOMI/USAHA.**

Upaya mendapatkan karakteristik kegiatan ekonomi/usaha dilakukan dengan cara pencacahan terhadap perusahaan menengah ke bawah yang tidak berbadan hukum secara sampel (contoh) dan pencacahan lengkap terhadap perusahaan besar dan menengah yang berbadan hukum.

### **2.2.1. Pencacahan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum.**

Pencacahan terhadap perusahaan tidak berbadan hukum dilakukan secara sampel (contoh). Hal ini ditempuh mengingat terlampau banyaknya kegiatan ekonomi jenis ini yang ada di lapangan. Untuk mengurangi beban pencacahan maka dipilih metode pencacahan tidak lengkap ini.

Dalam pelaksanaan pencacahan kegiatan ekonomi tidak berbadan hukum ini, sampel dijatuhkan pada wilcah/wilker. Artinya dari seluruh wilcah/wilker yang ada ditetapkan sebagiannya saja ( $\pm 20\%$ ) yang secara statistik diperkirakan mewakili keadaan seluruhnya. Ke wilayah yang dipilih sebagai contoh/wakil ini petugas diturunkan untuk melakukan pencacahan terhadap seluruh kegiatan ekonomi tidak berbadan hukum yang dijumpainya. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas mengacu pada hasil pendaftaran yang dilakukan dalam rangka membuat perkiraan populasi. Dan karena kegiatan pendaftaran dilakukan sebelum pencacahan ini, maka segala peruba-

han yang terjadi dapat dicatat. Perubahan yang dimaksud misalnya adalah yang tutup, pindah alamat, ganti usaha, maupun adanya usaha baru. Terhadap perusahaan tidak berbadan hukum yang ditemui tersebut dicacah mengenai karakteristik usaha seperti: struktur modal, struktur input dan output, tenaga kerja, pemasaran dan lain sebagainya.

#### 2.2.2. Pencacahan Perusahaan Berbadan Hukum.

Pencacahan perusahaan berbadan hukum dilakukan secara lengkap. Artinya semua perusahaan yang berbadan hukum didatangi untuk dicacah karakteristik usahanya. Acuan dari kegiatan ini adalah juga hasil dari kegiatan pendaftaran yang memang dilaksanakan lebih awal. Seperti halnya terhadap perusahaan tidak berbadan hukum, kepada perusahaan berbadan hukum ini juga dicacah mengenai struktur modal, struktur *input-output*, tenaga kerja, pemasaran dan lain sebagainya. Dan seperti terhadap perusahaan tidak berbadan hukum, dalam melakukan pencacahan terhadap perusahaan berbadan hukum ini diperlakukan menurut masing-masing sektor usahanya.

### 2.3. KEGIATAN PENUNJANG.

Selain dua kelompok kegiatan sensus ekonomi 1996 seperti diuraikan di atas ada lagi beberapa kegiatan lain yang menunjang kedua kelompok kegiatan tersebut. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai penunjang adalah yang berkategori; studi, pilot, evaluasi pasca sensus (EPS) dan pengolahan data.

Kegiatan studi dan pilot adalah kegiatan penjajagan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pokok dari awalnya. Sedang kegiatan EPS dan pengolahan data adalah kegiatan yang menunjang setelah kegiatan pokok selesai dilaksanakan.

#### 2.3.1. Studi.

Dalam kegiatan studi ini dilakukan pengkajian-pengkajian dalam rangka penyusunan materi teknis, merumuskan konsep/definisi, menentukan kasus batas, mengembangkan metodologi dan meletakkan dasar untuk landasan dan acuan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 1996. Seluruh studi yang dilaksanakan adalah:

1. Studi metode *sampling*.
2. Studi Penetapan wilch konsentrasi.

3. Studi Penetapan batas sektor usaha.
4. Studi Penetapan skala usaha.
5. Studi Penetapan sistim penyusunan direktori terpadu perusahaan.
6. Studi sektor usaha perdagangan/restoran.
7. Studi sektor usaha konstruksi.
8. Studi sektor usaha angkutan.
9. Studi sektor usaha lembaga keuangan.
10. Studi sektor usaha Jasa-jasa.
11. Studi sektor usaha lembaga sosial nirlaba.
12. Studi pencacahan jaringan perusahaan.

### 2.3.2. Pilot.

Pilot adalah kegiatan lanjutan yang memanfaatkan hasil studi. Dari hasil studi dirancang bentuk kuesioner (daftar pertanyaan) untuk digunakan dalam pencacahan. Dalam kegiatan pilot inilah diuji rancangan daftar pertanyaan yang sudah dibuat tersebut, beserta dengan rancangan metodologi pencacahannya, buku pedomannya, konsep dan definisinya serta organisasi lapangannya.

Rancangan lain yang juga diujicobakan dengan pilot adalah sistem pengolahan dan penyajian data.

Kegiatan pilot menghasilkan catatan dan koreksi yang diperlukan untuk menyempurnakan segala hal sebelum benar-benar dilaksanakan sebagai kegiatan pokok sensus ekonomi 1996.

### 2.3.3. Evaluasi Pasca Sensus.

Evaluasi pasca sensus (EPS) adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengukur tingkat akurasi dari pelaksanaan sensus yang sudah dilaksanakan. Dengan ukuran tingkat akurasi yang didapat, bisa diukur tingkat kesalahan (*non sampling error*) yang terjadi, baik yang berasal dari kesalahan cakupan (*coverage*) maupun kesalahan isian (*content*).

### 2.3.4. Pengolahan Data.

Pengolahan data menjadi kegiatan yang cukup menonjol dalam hal menunjang pelaksanaan setiap sensus, demikian pula pada pelaksanaan sensus ekonomi 1996. Hal itu terutama dikarenakan dalam setiap diselenggarakannya sensus, terkumpul data yang sangat besar. Padahal sebagai kegiatan yang bersifat penelitian sensus harus

menghasilkan ringkasan data sehingga mudah dipahami hasilnya. Untuk itulah dibutuhkan daya yang besar dalam upaya tersebut.

Pada era sekarang kegiatan pengolahan data banyak ditunjang oleh perangkat komputer. Sehingga untuk mencapai hasil yang optimal disusun sistim pengolahan data yang efisien dan efektif. Proses pengolahan data dalam sensus ekonomi 1996 sekurang-kurangnya terdiri atas serangkaian kegiatan:

1. *Batching* yaitu pembendelan dokumen hasil pencacahan untuk memudahkan pengelolaan.
2. *Editing* yaitu penyuntingan isian dokumen hasil pencacahan agar sejalan dengan sistem pengolahan tanpa meninggalkan konsep/definisi yang digunakan.
3. *Data entry* yaitu penyalinan isian dokumen kedalam media komputer.
4. *Editing post computer* yaitu penyuntingan tahap lanjut setelah beberapa tabel dasar dihasilkan. Tabulasi yaitu pencetakan tabel-tabel hasil pelaksanaan sensus tersebut.

### 3. TAHAPAN KEGIATAN.

Seperti disebutkan terdahulu bahwa sensus ekonomi 1996 adalah suatu kegiatan yang berskala besar. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Dan sejalan dengan kelompok kegiatannya maka tahapan pelaksanaan sensus ekonomi 1996 secara garis besar terbagi dalam dua tahap yaitu; tahap pertama Penjajagan yang bertujuan menghitung/memperkirakan populasi kegiatan ekonomi/usaha sektoral dan regional, tahap kedua untuk mengumpulkan data karakteristik dari kegiatan ekonomi/usaha. Dan sejalan dengan jenis kegiatannya yang juga beragam maka pada masing-masing tahap itupun terdiri dari beberapa kegiatan rinci, termasuk di dalamnya studi, pilot, EPS dan pengolahan datanya. Dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari tahap II dilaksanakan lebih awal dari kegiatan lain yang merupakan bagian dari tahap I.

Secara keseluruhan, kegiatan sensus ekonomi 1996 sudah dimulai sejak tahun anggaran 1994/1995 dengan kegiatan studi dan beberapa pilot mengenai pendaftaran kegiatan ekonomi dan penyusunan Direktori Terpadu Perusahaan. Dan tuntasnya, sensus ekonomi 1996 nanti akan diakhiri pada tahun anggaran 1998/1999 dengan penyajian data final hasil sensus. Sedang dari masing-masing tahapannya diperoleh beberapa "*intermediate output*" yang lebih banyak diperlukan bagi pelaksanaan tahap berikutnya.

#### 3.1. Tahap I: Penjajagan.

Awal pelaksanaan tahap I sensus ekonomi 1996 praktis didominasi oleh kegiatan studi dan pilot. Pada tahun anggaran 1994/1995, sepuluh jenis studi dilaksanakan antara bulan Juni sampai dengan September 1994. Yaitu mulai dari studi metodologi *sampling* sampai dengan studi sektor-sektor usaha.

Dilanjutkan dengan kegiatan pilot pendaftaran kegiatan ekonomi pada Januari 1995. Di sela-sela kegiatan itu juga dilaksanakan kegiatan *updating* wilcah pada bulan September - Desember 1994 dan penyusunan direktori terpadu dengan cara menyalin dari instansi pemerintah atau badan lain yang memiliki catatan serupa direktori.

Pada tahun anggaran 1995/1996 beberapa kegiatan bagian tahap I yang dilaksanakan adalah:

1. Studi jaringan perusahaan berbadan hukum pada Juni 1995.

2. Pemetaan wilker pada wilcah konsentrasi pada Agustus - September 1995.
3. Pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha pada Desember 1995 - Januari 1996.
4. Pemutakhiran direktori terpadu perusahaan pada Desember 1995 - Pebruari 1996.
5. Evaluasi pasca sensus pada Pebruari 1996.

Pada kegiatan studi jaringan perusahaan berbadan hukum, dilakukan peninjauan terhadap hubungan administratif antara perusahaan yang berstatus Induk/Pusat dengan jajaran perusahaan bawahannya (Cabang, Perwakilan, Unit Pembantu atau lainnya). Peninjauan tersebut diarahkan untuk menentukan perusahaan level mana yang bisa/perlu dijadikan satuan penelitian sensus ekonomi 1996. Perlu/tidaknya suatu perusahaan dijadikan satuan penelitian didasarkan pada metodologi umum sensus ekonomi 1996.

Dalam kegiatan pemetaan wilker (wilayah kerja) pada wilcah konsentrasi dimaksudkan untuk membuat/menetapkan batas wilcah yang nantinya akan menjadi wilayah bekerjanya seorang petugas pencacah. Tanpa adanya peta dikhawatirkan petugas pencacah bisa;

- Tanpa sengaja meninggalkan sebagian wilayahnya tidak dijamah atau sebaliknya,
- Tanpa sengaja melakukan pencacahan di wilayah lain yang merupakan tanggungjawab petugas lain.

Pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha yang dilaksanakan pada tahun anggaran 1995/1996 tersebut adalah merupakan puncak kegiatan sensus ekonomi 1996 tahap I. Dalam kegiatan ini, petugas mencacah semua kegiatan ekonomi/usaha yang dijumpai di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan cara mendatangi semua bangunan yang ada di wilayah kerjanya untuk menanyakan ada/tidaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan di sana.

Dalam tahap pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha semua jenis kegiatan ekonomi/usaha (selain sektor pertanian) yang dilakukan oleh masyarakat dicacah. Termasuk di dalamnya adalah perusahaan yang berbadan hukum. Dalam kaitan itu pula kegiatan pemutakhiran direktori terpadu perusahaan dilaksanakan. Artinya bersama-sama dengan kegiatan pendaftaran ekonomi/usaha, ada petugas yang secara khusus ditugasi untuk mencocokkan keberadaan di lapangan; perusahaan berbadan hukum yang tercatat pada direktori.

Evaluasi pasca sensus seperti disebutkan di muka, dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh ukuran akurasi hasil pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha dalam hal cakupan dan muatan.

Pada tahun anggaran 1996/1997 kegiatan sensus ekonomi 1996 yang termasuk katagori tahap I adalah pengolahan awal hasil pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha yang dilaksanakan sepanjang tahun. Pengolahan yang dilakukan pada tahun anggaran 1996/1997 ini mencakup analisis sederhana dan diarahkan untuk menghasilkan data dasar serta penyediaan kerangka sampel untuk kegiatan sensus ekonomi 1996 selanjutnya.

### **3.2. Tahap II: Mendapatkan Data Karakteristik Kegiatan Ekonomi/Usaha.**

Kegiatan tahap II ini diawali pada tahun anggaran 1995/1996 dengan studi penetapan metodologi dan materi yang akan dicakup dalam pencacahan kegiatan ekonomi/usaha.

Pada tahun anggaran yang sama kegiatan tersebut dilanjutkan dengan kegiatan pilot yang pada kesempatan tersebut dinamakan sebagai gladi bersih. Dalam gladi bersih tersebut dilakukan ujicoba terhadap kuesioner, konsep dan definisi, organisasi lapangan, sistem pengolahan dan tabulasi yang akan digunakan pada pencacahan kegiatan ekonomi/usaha.

Tahun anggaran 1996/1997 kegiatan sensus ekonomi 1996 tahap II diawali dengan kegiatan *brifing* pengusaha. Pada kegiatan ini dilakukan pendekatan kepada pengusaha kelompok menengah yang tidak berbadan hukum untuk menyampaikan rencana pelaksanaan sensus ekonomi 1996 yang akan melibatkan mereka. Pada kesempatan tersebut kepada para pengusaha disampaikan tentang makna pentingnya sensus ekonomi 1996. Pejabat pemerintah pemangku wilayah (Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa) juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut, termasuk juga para pejabat (pemerintah/swasta) yang mengelola kawasan usaha (misalnya pasar, pertokoan, kawasan industri dan lain sebagainya).

Kegiatan tahap II yang berikutnya adalah pencacahan kegiatan ekonomi/usaha yang tidak berbadan hukum pada oktober - Nopember 1996. Kegiatan tersebut merupakan puncak pertama dari kelompok kegiatan tahap II sekaligus sebagai puncak kegiatan pada tahun anggaran 1996/1997. Pada kegiatan ini dilakukan pencacahan terhadap beberapa kegiatan ekonomi/usaha yang tidak berbadan hukum. Beberapa kegiatan

ekonomi/usaha dimaksud adalah yang berlokasi di wilayah-wilayah yang secara metodologi sensus ekonomi 1996 ditunjuk/terpilih sebagai wilayah yang mewakili seluruh keadaan.

Kegiatan lain yang segera mengikuti adalah evaluasi pasca sensus. Dalam kegiatan ini seperti disebutkan di muka, akan diukur tingkat akurasi pelaksanaan pencacahan kegiatan ekonomi/usaha.

Kegiatan lain yang dilakukan pada tahun anggaran 1996/1997 adalah pengolahan awal hasil pencacahan kegiatan ekonomi/usaha tidak berbadan hukum.

Tahun anggaran 1996/1997 ditutup dengan kegiatan kelompok tahap II berupa studi, pilot, dan gladi bersih untuk menyiapkan pelaksanaan pencacahan kegiatan ekonomi/usaha berbadan hukum yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 1997/1998.

Pada tahun anggaran 1997/1998 kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- Lanjutan analisis dan publikasi hasil pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha dan direktori terpadu perusahaan.
- Lanjutan pengolahan hasil pencacahan kegiatan ekonomi/usaha tidak berbadan hukum. Pengolahan lanjutan ini diharapkan tuntas pada tahun anggaran 1997/1998 ini.
- *Briefing* pengusaha ke dua. *Briefing* ini lebih ditujukan kepada pengusaha dari kegiatan ekonomi/usaha berbadan hukum. Materi *briefing* lebih kurang sama dengan materi *briefing* serupa yang ditujukan kepada pengusaha dari kegiatan ekonomi/usaha tidak berbadan hukum.
- Pencacahan lengkap kegiatan ekonomi/usaha berbadan hukum. Kegiatan ini merupakan puncak ke dua dari pelaksanaan kelompok sensus ekonomi 1996, sekaligus sebagai puncak kegiatan tahun anggaran 1997/1998. Dalam kegiatan ini, seluruh kegiatan ekonomi/usaha yang berbadan hukum akan didatangi petugas untuk dicacah/didata mengenai karakteristik usahanya. Acuan yang digunakan untuk mendatangi seluruh kegiatan ekonomi/usaha berbadan hukum ini adalah direktori terpadu perusahaan yang sudah terbentuk dari hasil pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha.
- Evaluasi pasca sensus (EPS).  
Seperti terhadap kegiatan pendaftaran dan pencacahan lain yang sudah disebutkan terdahulu, terhadap pencacahan kegiatan ekonomi/usaha berbadan hukum juga akan dilakukan EPS.

Tahun anggaran 1998/1999 merupakan tahun akhir pelaksanaan rangkaian kegiatan sensus ekonomi 1996. Dalam tahun tersebut diharapkan seluruh hasil sensus ekonomi 1996 sudah dapat dipublikasikan secara final. Dengan demikian rangkaian kegiatan sensus ekonomi 1996 berakhir pada tahun anggaran 1998/1999.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

#### 4. PENUTUP.

Setelah beberapa hal pokok yang berkaitan dengan sensus ekonomi 1996 diuraikan, hal yang perlu diuraikan selanjutnya adalah;

- Istilah-istilah teknis yang banyak digunakan dalam kegiatan sensus ekonomi 1996.
- Indikator-indikator yang diharapkan diperoleh dari pelaksanaan sensus ekonomi 1996.

Uraian mengenai kedua hal tersebut di atas akan menutup laporan ini sebagai berikut.

##### 4.1. Beberapa Istilah Teknis Yang Banyak Digunakan.

Uraian mengenai istilah teknis ini perlu disampaikan karena dalam pembicaraan sehari-hari lebih banyak digunakan terutama di lingkungan BPS sebagai pelaksana kegiatan sensus ekonomi 1996. Istilah-istilah teknis yang banyak digunakan adalah:

1. SE96: digunakan untuk menyebut secara singkat kegiatan sensus ekonomi 1996.
2. Wilcah: kependekan dari wilayah pencacahan adalah satuan wilayah (non administratif) dibawah desa/kelurahan yang dibentuk oleh BPS untuk keperluan survei atau sensus berkala. Wilcah dibentuk dengan dasar; berisi lebih kurang 200 rumahtangga dan dibatasi oleh batas alam/buatan yang jelas.
3. Wilker: adalah wilayah dibawah wilcah yang dibentuk oleh BPS dalam rangka pelaksanaan sensus ekonomi 1996. Dalam satu wilker berisi lebih kurang 200 kegiatan ekonomi/usaha dan dibatasi oleh batas alam/buatan yang jelas.
4. Kegiatan Ekonomi: adalah sasaran penelitian sensus ekonomi 1996. Kegiatan ekonomi dapat berupa kegiatan usaha, dapat berupa penunjang kegiatan usaha (misalnya gudang, loket dan lain sebagainya).
5. PD: adalah kependekan dari Perusahaan Direktori. Seperti diketahui bahwa dari sensus ekonomi 1996 akan diperoleh direktori terpadu perusahaan-perusahaan yang

berbadan hukum. Maka perusahaan yang layak masuk kedalam direktori tersebut yang kemudian disebut sebagai PD (Perusahaan Direktori).

6. URT: adalah kependekan dari Usaha Rumah Tangga. Dimaksudkan sebagai kegiatan ekonomi berskala kecil. Misalnya bakso keliling, jamu gendong, tukang becak dan sebagainya. Kelompok usaha ini dicirikan oleh kegiatannya yang tidak menempati suatu bangunan secara menetap.
7. PND: adalah kependekan dari Perusahaan Non Direktori. Penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk menampung golongan kegiatan ekonomi yang skalanya dibawah PD tetapi diatas URT. Misalnya restoran, toko, panti pijat dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi kelompok ini dicirikan oleh pemakaian bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, tetapi belum memiliki badan hukum.
8. Badan Hukum: adalah bentuk pengesahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Yang dikategorikan sebagai badan hukum adalah: PT, CV, Firma, PN, Perum, NV, Koperasi dan Yayasan. Istilah Badan Hukum lebih luas disebut secara singkat sebagai BH.
9. Pendaftaran: adalah istilah teknis statistik yang diterjemahkan dari kata "*listing*". Adalah kegiatan pencacahan keberadaan suatu unit penelitian. Kata pendaftaran di sini lebih dekat pada kegiatan membuat daftar dan bukan seperti yang terjadi pada kata (misalnya): pendaftaran murid baru.
10. Pencacahan: adalah kegiatan pokok dari suatu penelitian beberapa survei atau sensus. Kegiatan ini mirip dengan kegiatan wawancara antara petugas dengan responden. Dalam wawancara tersebut petugas mengacu pada daftar pertanyaan/kuesioner. Dan pada dasarnya pencacahan adalah kegiatan mengisi kuesioner yang dilakukan oleh petugas dengan cara menemui responden.
11. Survei: adalah penelitian menggunakan kuesioner yang dilakukan terhadap sebagian unit penelitian. Pemilihan "sebagian" unit yang disurvei didasarkan pada metodologi statistik.
12. Sensus: adalah penelitian dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan terhadap seluruh unit penelitian.
13. Responden: adalah sasaran penelitian. Dalam sensus ekonomi merupakan terjemahan dari pemilik/pengelola suatu kegiatan ekonomi/usaha.

#### 4.2. Beberapa Indikator Yang Diharapkan Diperoleh Dari SE96.

Karena salah satu tujuan dilaksanakannya sensus ekonomi 1996 adalah untuk melihat perkembangan keadaan dunia usaha dalam 10 tahun terakhir, maka indikator pokok yang diharapkan diperoleh adalah yang bisa langsung dibandingkan dengan hasil pelaksanaan sensus ekonomi 1986. Indikator pokok tersebut misalnya adalah:

1. Banyaknya perusahaan/kegiatan ekonomi menurut sektor usaha (selain sektor pertanian).
2. Banyaknya perusahaan/kegiatan ekonomi menurut skala usaha (besar, sedang, kecil atau PD,PND,URT).
3. Banyaknya tenaga kerja diperusahaan/kegiatan ekonomi menurut sektor usaha (selain sektor pertanian)>
4. Banyaknya tenaga kerja diperusahaan/ kegiatan ekonomi menurut skala usaha.

Beberapa indikator lain yang juga diharapkan adalah:

1. Omset usaha dalam 1 tahun.
2. Tahun mulai beroperasi.
3. Jenis barang/Jasa yang diproduksi.
4. Hari kerja dalam 1 bulan.
5. Bulan kerja dalam 1 tahun.
6. Pekerja dibayar.
7. Pekerja tidak dibayar.
8. Kelompok umur pekerja.
9. Jenis kelamin pekerja.
10. Tingkat pendidikan pekerja.
11. Biaya umum usaha.
12. Biaya khusus usaha.
13. Output usaha.
14. Struktur modal usaha.
15. Penggunaan modal usaha.
16. Pandangan pengusaha tentang keadaan usaha.
17. Pandangan pengusaha tentang prospek pengusaha.
18. Kendala utama usaha.
19. Kemitraan usaha.
20. Pembinaan/Bimbingan usaha.
21. Akses kepada perbankan.
22. Pajak usaha.